



Sinergi Wujudkan Kota Layak Anak

YOGYA, TRIBUN - Media massa memiliki andil dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, khususnya untuk mencapai ke jenjang utama. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad.

Ia menjelaskan, Kota Layak Anak diwujudkan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

"Upaya pemenuhan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Tapi harus ada keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Media massa dalam hal ini adalah tidak menyudutkan anak sebagai korban, melakukan pelatihan jurnalistik pada anak, dan menjalankan perlindungan anak," bebernya, saat menggelar jumpa pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis (28/3).

Pada kesempatan tersebut, seluruh perwakilan media massa yang datang memberikan tanda tangan sebagai

bentuk komitmen dengan 4 poin. Mulai dari menghindari pemberitaan yang berdampak buruk bagi anak, melakukan publikasi pemenuhan hak anak yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, menyediakan akses dan informasi yang layak bagi anak, dan menyediakan sumber daya jurnalistik yang sensitif gender dan anak. Kota Layak Anak sendiri, lanjutnya, berdasarkan kepada Perda 1/2016 tentang Kota Layak Anak.

"Ada 5 Kluster yang harus dipenuhi yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan keluarga, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, dan terakhir perlindungan khusus," ucapnya.

Edy menjelaskan terkait hak sipil anak dan kebebasan, upaya yang telah dilakukan Pemkot meliputi pelayanan akta anak, informasi yang telah disaring sehingga layak bagi anak-anak, serta memberikan kesempatan mereka untuk dapat berpartisipasi.

Selanjutnya, kluster lingkungan keluarga pengasuhan alternatif contohnya adalah

mendirikan PAUD, membangun infrastruktur yang ramah anak, serta mendirikan pusat Konsultasi pada orang tua dan keluarga. Kemudian untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan keluarga upayanya yakni agar semua Puskesmas menjadi ramah anak, pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), akses yang mudah terhadap air minum dan sanitasi.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Yogyakarta, Fatma Rosadi mengatakan bahwa saat ini posisi Kota Yogyakarta ada di jenjang Nindya dengan nilai 700-800. Pihaknya menargetkan untuk tahun ini bisa mencapai jenjang Pratama dengan nilai 800-900.

"Kalau saat ini, posisi terakhir Kota Yogyakarta nilainya 160. Ini karena masih banyak dokumen yang belum diunggah karena syarat agar nilai keluar adalah menggunggah bukti administrasi dari kluster-kluster tersebut," bebernya.

Adapun syarat lainnya, untuk bisa menuju utama dikatakan Fatma adalah dengan memiliki fasilitas ruang bermain ramah anak dan pusat kreativitas anak minimal 2 unit. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005